

Evaluasi Keterlambatan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pinjaman Hibah Luar Negeri Saudi *Fund for Development*

Budi Setiawan⁽¹⁾, Apif M Hajji⁽²⁾, Dian Ariestadi⁽³⁾, Imam Alfianto⁽⁴⁾

Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Kota Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹buzhet07@gmail.com, ²apif.miptahul.ft@um.ac.id, ³dian.ariestadi.ft@um.ac.id,
⁴imam.alfianto.ft@um.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima 7 Desember 2023
Direvisi 16 Desember 2023
Disetujui 17 Desember 2023
Dipublikasikan 30 Mei 2024

Keywords:

Feasibility study, Feasibility study. Market Aspect. Financial Aspect

Kata Kunci:

Aspek Finansial; Aspek Pasar; Feasibility study; Study kelayakan

Corresponding Author:

Name:
Budi Setiawan
Email:
buzhet07@gmail.com

Abstract: *One of the financing for construction work is financing sourced from foreign loans or grants/PHLN. This type of financing model always has guidelines set by the lender/lender. The procurement implementation guidelines created by these lenders are sometimes not in line with the Goods and Services Procurement Regulations in Indonesia, giving rise to the problem of delays in procurement implementation time in searching for potential construction service providers. The aim of the research is to evaluate the influence of regulations for the procurement of construction goods and services in Indonesia on the guidelines made by SFD lenders, causing progress in the implementation of construction tenders to be delayed. The research method used is to identify variable instruments owned by researchers from primary and secondary data, which are then developed into variables and indicators and processed using the nvivo application. From the results of the data processing, it was then evaluated and validated using data from interviews conducted with several service providers with PHLN. The results of the data processing showed that there were several factors that caused the procurement process to be completed late. The first factor is the existence of procurement regulations of the Republic of Indonesia which are not in line with the lender's guidelines, the second factor is the experience of actors procuring goods and services from PHLN funding sources, the third factor is the communication factor between relevant stakeholders and the fourth is the cultural factor possessed by the lender country.*

Abstrak: Salah satu pembiayaan pekerjaan konstruksi adalah pembiayaan yang bersumber dana pinjaman atau hibah luar negeri/PHLN. Model pembiayaan seperti ini selalu memiliki pedoman yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman/lender. Pedoman pelaksanaan pengadaan yang dibuat oleh lender ini terkadang tidak sejalan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, sehingga memunculkan permasalahan kemunduran waktu pelaksanaan pengadaan dalam mencari calon penyedia jasa konstruksi. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pengaruh peraturan pengadaan barang dan jasa konstruksi di Indonesia terhadap s yang dibuat lender SFD sehingga menyebabkan progress pelaksanaan

tender konstruksi menjadi terlambat. Metode penelitian yang digunakan adalah mengidentifikasi instrumen variabel yang dimiliki peneliti dari data primer dan sekunder, untuk selanjutnya dikembangkan menjadi variabel dan indikator dan diolah dengan menggunakan aplikasi nvivo. Dari hasil olah data selanjutnya dievaluasi dan dilakukan validasi menggunakan data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku pengadaan jasa dengan PHLN ini. Hasil olah data diperoleh ada beberapa faktor yang menjadi penyebab proses pengadaan menjadi terlambat penyelesaiannya. Faktor pertama adalah adanya peraturan pengadaan Republik Indonesia yang tidak sejalan dengan pedoman dari lender, yang kedua faktor pengalaman pelaku pengadaan barang dan jasa sumber dana PHLN, faktor ketiga adalah faktor komunikasi antar stakeholder terkait dan keempat adalah faktor budaya yang dimiliki oleh negara lender.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan proyek adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang ideal adalah pengadaan yang dilakukan untuk menjamin efisiensi, transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Listiyanto, 2012). Pengadaan jasa konstruksi bertujuan untuk mendapatkan pelaksana dalam implementasi sebuah proyek konstruksi. Pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini sudah dipayungi oleh sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia yaitu (Perpres Nomor 16 Tahun 2018, 2018) dan (PERPRES RI No. 12 Tentang Perub PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021) dalam upaya untuk mencari penyedia melalui tahapan proses lelang agar tercapai penyedia barang/jasa yang baik secara mutu dan kualitas pekerjaan serta tepat waktu dalam penyelesaian hingga serah terima pekerjaan (Hamkah & Purwanto, 2018).

Sejalan dengan (Faisal et al., 2017) dalam pembiayaan pekerjaan konstruksi di Indonesia memiliki beberapa jenis pembiayaan, antara lain pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN dan APBD). Selain itu pembiayaan konstruksi bisa menggunakan sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri/PHLN atau biasa disebut *loan*. Pada penelitian (Suryani, 2016) pinjaman luar negeri memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap defisit anggaran, sehingga pada dasarnya pinjaman luar negeri masih sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan sistem perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Menurut (G. Nobalazi, A Manlian, 2021) dalam pengadaan barang/jasa konstruksi sangat diperlukan standar dokumen mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan dan serah terima. Hal ini berbeda dengan metode pengadaan barang dan jasa pada *loan* yang memiliki beberapa peraturan/regulasi yang mengikat dari *lender* dan beberapa unsur persyaratan yang berbeda dengan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan di Indonesia. Sistem pedoman pelaksanaan pengadaan yang dibuat oleh pihak *lender* ini yang sering membuat sebuah benturan dengan sistem peraturan pengadaan yang berlaku di Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi antara peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia dengan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pihak *lender*.

Dalam implementasi kegiatan pengadaan jasa konstruksi di Indonesia pada dasarnya sudah mengalami peningkatan dalam pengembangan teknologinya. Sistem atau metode pengadaan yang sudah berlaku saat ini adalah sistem elektronik atau *e-procurement*. Menurut (Mayasari, 2019) pengadaan konstruksi dengan sistem elektronik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem manual, termasuk dari segi waktu pelaksanaannya. Akan tetapi pengadaan konstruksi dengan sumber dana dari luar negeri secara umum masih menggunakan metode atau sistem manual. Sesuai (Widjanarko, 2021) ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Salah satu faktor tersebut adalah proses pengadaan yang berlangsung lama sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan fisik. (Bekli et al., 2010) juga menyampaikan pada hasil penelitiannya bahwa ada beberapa hal yang ditemukan dan perlu dikaji lebih lanjut pada proses pelaksanaannya pengadaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri *Islamic Development Bank (IDB)*.

Hal tersebut terjadi pada pengadaan konstruksi Pembangunan kampus III UIN Malang. Lamanya proses pengadaan konstruksi untuk menentukan pemenang lelang menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi proses pengadaan konstruksi khususnya pada pengadaan konstruksi dengan sumber dana dari investor luar negeri baru yang ada di Indonesia yaitu *Saudi Fund for Development*. Evaluasi tersebut diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap tentang penyebab lamanya pelaksanaan proses pengadaan ini.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) menurut SKB No.185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 antara Menteri Keuangan dan Bappenas adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupakan maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman ini diperoleh dari negara asing, lembaga multilateral, serta lembaga keuangan/non keuangan yang berdomisili diluar wilayah Negara Republik Indonesia (Fithriyah, 2017).

Dari penelitian sebelumnya (Hanik & Sugiantoro, 2010) aplikasi penggunaan dana pinjaman ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena masih mempunyai pengaruh jika dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu panjang. Dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), hingga tahun 2021 pinjaman Negara Indonesia didominasi oleh pinjaman asing/bilateral dan pinjaman lembaga multilateral, antara lain: *Asian Development Bank/ADB*, *World Bank*, *Islamic Development Bank (IsDB)* dan lembaga investasi lainnya.

Salah satu pembiayaan proyek dengan kreditor bilateral di Indonesia adalah pinjaman dari *Saudi Fund for Development (SFD)*. Berdasarkan situs resmi *sfd.gov.sa*, *SFD* merupakan lembaga keuangan pemerintah Arab Saudi yang memberikan bantuan pembiayaan pembangunan kepada negara-berkembang, baik itu pembiayaan pengembangan proyek di bidang pendidikan, sosial maupun proyek infrastruktur. Dalam kegiatan kerjasama, *SFD* membuat sebuah pedoman sebagai aturan pengelolaan dana pinjaman dan sebagai dasar monitoring serta evaluasi penggunaan dana pinjaman (SFD s, 2001).

Pada proses lelang konstruksi ini metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen lelang adalah menggunakan metode dengan 2 (dua) tahap. Metode ini memiliki sistem penyampaian dokumen yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Penyampaian dokumen harga hanya akan disampaikan oleh peserta yang lulus pada tahap seleksi administrasi dan teknis. Dalam teknis penyerahan dokumen dilakukan dengan sistem manual atau konvensional sesuai dengan yang tertulis pada dokumen dari *lender*.

Semua proses dan tahapan tersebut sebenarnya sudah dibuat di dalam sebuah *timeline* waktu pelaksanaan proses lelang pada awal perencanaan pengadaan. Menurut (Widjanarko, 2021) Masalah klasik keterlambatan proyek pinjaman luar negeri telah berlangsung lama dan diperkirakan akan terus terjadi. Keterlambatan disumbang oleh faktor faktor dalam tahap perencanaan; pengefektifan pinjaman, penganggaran, pelelangan, pencairan, dan pelaksanaan di lapangan. Pada dasarnya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang atau pengadaan jasa konstruksi pada *SFD* ini sebenarnya tidaklah membutuhkan waktu yang lama apabila semua proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, faktor utama dalam penentuan penilaian sebuah evaluasi kinerja adalah sumber daya manusia. Metode pendekatan kualitatif dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (Moha & sudrajat, 2019). Penelitian metode ini berfokus pada proses pengumpulan data yang beriringan dengan proses pelaksanaan penelitian. Peneliti akan melakukan identifikasi data dan observasi lapangan selama proses pengadaan penyedia jasa konstruksi berlangsung, sehingga data yang diterima benar-benar sudah sempurna.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bantuan software *NVivo 12 Plus for windows* untuk menganalisa penulisan atau penelitian data kualitatif maupun *mixmethod*. Pemilihan metode analisa menggunakan aplikasi *nvivo* ini dikarenakan *NVivo* memiliki fitur yang dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam mengorganisir data penelitian dengan pengklasifikasian yang rapi menggunakan *coding*.

Tahap pertama dari rancangan penelitian ini adalah melakukan penelitian awal atau survey awal dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Selanjutnya, dari hasil observasi pada setiap peristiwa yang terjadi dalam proses lelang akan ditulis sebagai data awal ditemukannya permasalahan pada proses lelang tersebut. Kemudian akan dilakukan kajian

terhadap literatur yang terkait dengan rumusan permasalahan yang sudah ditemukan untuk kemudian dilakukan penelitian lebih dalam hingga nanti diakhir dapat dimunculkan visualisasi hasil penelitian ini.

Hasil visualisasi dari analisa dengan *NVivo* ini dapat dibuat dalam bentuk *hierarchy chart*, grafik ataupun diagram/*project map*. Menurut (Bandur, 2019) “Istilah *Project Map* sebenarnya mengacu kepada tema-tema hasil koding yang sudah dilakukan sehingga hasil koding tersebut bisa divisualisasikan”. Selanjutnya langkah terakhir adalah peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait secara langsung pada proses pengadaan ini sebagai bentuk uji *confirmability* atau memvalidasi hasil olah data dengan menggunakan triangulasi sumber agar hasil penelitian ini bisa dikatakan obyektif dan *reliabel*.

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap tiga narasumber dari stakeholder terkait proses lelang konstruksi ini. narasumber pertama adalah Manager Project Management Unit sekaligus PPK kegiatan proyek, bendahara *Project Management Unit* yang berpengalaman sebagai pimpinan proyek pembangunan kampus 1 UIN Malang sumber dana hibah luar negeri dan narasumber ketiga merupakan sekretaris *Project Management Unit* yang memiliki peran aktif dalam membangun dan menjembatani komunikasi dengan pihak *Saudi Fund for Development*.

Diperlukan sebuah kajian yang lebih dalam tentang pengaruh adanya pedoman pengadaan dari *SFD* sebagai pihak pemberi pinjaman terhadap regulasi proses pengadaan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya terhadap tahapan dan waktu pelaksanaan proses pengadaan lelang konstruksi pada studi kasus pengadaan jasa konstruksi proyek pembangunan kampus III (*civil work and infrastructure*) tahap II Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Data primer diperoleh dari literatur tentang peraturan pemerintah yang mengatur proses pengadaan ini sampai dengan pedoman yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman atau *Loan* dan hasil penelitian terdahulu. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dan lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dengan pinjaman luar negeri. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia; dan 4) Pedoman yang dikeluarkan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu *Saudi Fund for Development*, *SFD Guidelines* Tahun 2001 pada *Procurement Guideline*.

Observasi terhadap sumber daya yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan untuk setiap proses yang dilakukan. Tahapan data sekunder ini dimulai dengan melakukan pengamatan awal saat penentuan panitia kelompok kerja (POKJA) dan pengamatan keterlibatan personil lain pada setiap proses yang dilakukan. Selanjutnya melakukan observasi terhadap dokumen awal dalam perencanaan pengadaan ini. Data lain yang dikumpulkan adalah melakukan wawancara dengan 3 narasumber (manager, sekretaris dan bendahara Project Management Unit UIN Malang) sebagai uji *confirmability* dalam upaya untuk memvalidasi hasil visualisasi dari aplikasi *NVivo*.

Dalam mengolah data menggunakan *NVivo* terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis data; a) Import data dalam penelitian ini dilakukan pada data primer dan sekunder dalam bentuk dokumen baik word maupun PDF. Data dalam bentuk word merupakan data hasil wawancara dengan ketiga narasumber dalam penelitian ini yang sudah ditranskrip; b) Setelah seluruh data penelitian, yang berbentuk dokumen telah diimpor, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi data. Klasifikasi data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu klasifikasi data wawancara dan data dokumentasi (observasi dan literatur); c) *Coding* data, langkah ini melibatkan penerapan kode pada bagian-bagian yang relevan dalam data penelitian ini. Dalam penelitian ini koding dilakukan dengan menggunakan berbagai metode,

termasuk menyorot teks, mengelompokkan bagian dalam kategori, atau menggunakan fitur-fitur lain yang disediakan oleh NVivo; d) "*Word cloud*" ini dapat memberikan gambaran visual yang cepat tentang kata-kata yang paling sering muncul dalam data penelitian ini. Dalam konteks "proses pengadaan jasa konstruksi Pembangunan kampus III (*Civil Work and Infrastructure*) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", kata-kata yang sering muncul dan relevan dalam *word cloud* adalah Pengadaan; Jasa; Barang; Pekerjaan; Pemilihan dan Konstruksi; e) *Nodes* adalah entitas penting yang digunakan untuk mengorganisir, mengklasifikasikan dan analisis data penelitian. *Nodes* dalam penelitian ini terkait dengan faktor yang menyebabkan proses pengadaan jasa menggunakan dana luar negeri dalam pembangunan Gedung UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengalami keterlambatan; f) Hasil output NVivo yang bersumber dari dokumen terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi dapat divisualisasikan menggunakan *project map*. Berikut ini hasil *query frequency* kata dari olah data dengan NVivo;

Tabel 1. *Word Frequency Query Result*

No.	Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
1	Pengadaan	9	896	2,07
2	Jasa	4	874	2,02
3	Barang	6	598	1,38
4	Pekerjaan	9	508	1,17
5	Pemilihan	9	502	1,16
6	Konstruksi	10	425	0,98
7	Dokumen	7	408	0,94
8	Kontrak	7	373	0,86
9	Penawaran	9	369	0,85
10	Penyedia	8	364	0,84
11	Pelaksanaan	11	331	0,76

HASIL DAN PEMBAHASAN

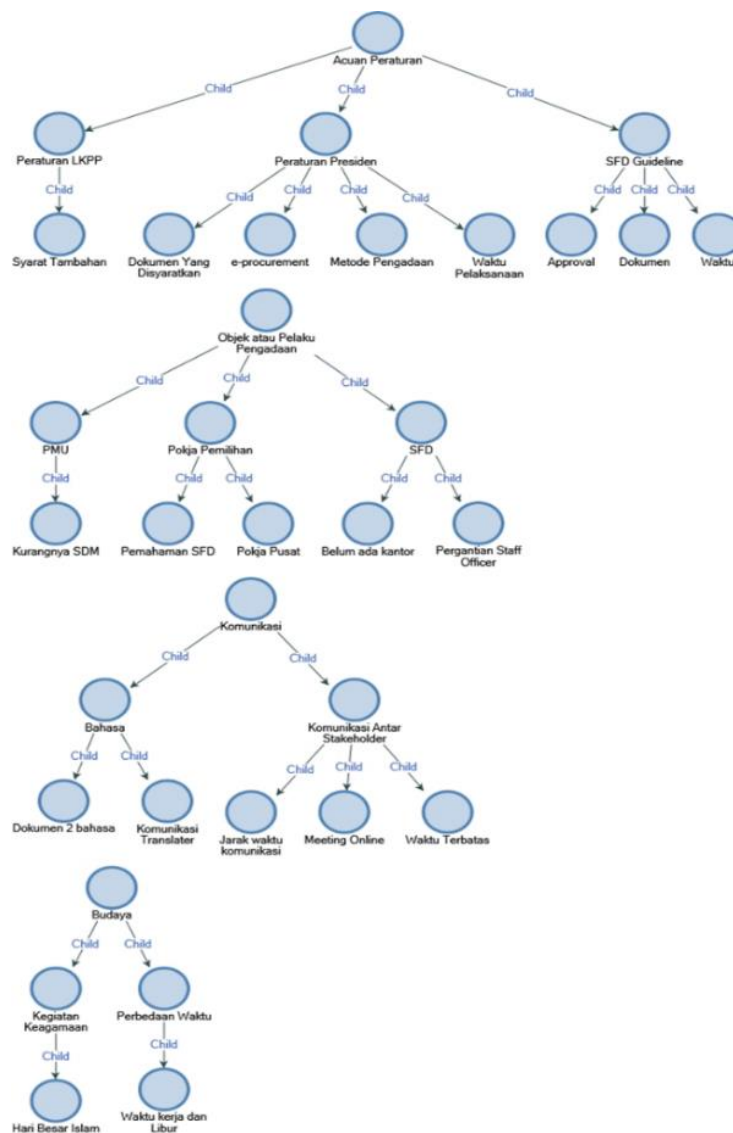
Dari hasil dari olah data terlihat bahwa pengadaan merupakan kata kunci utama yang menjadi fokus analisis yang merupakan dasar dari semua aspek permasalahan yang terjadi dalam evaluasi. Berikut ini hasil visualisasi word cloud dari hasil *word frequency query*.



Gambar 1. *Word Cloud* Hasil Olah Data *Word Frequency*

. Peneliti selanjutnya akan membuat *nodes* untuk mengelompokkan segmen data yang relevan, seperti kutipan, anotasi, atau bagian teks lainnya yang sudah diperoleh dari rumusan hasil observasi pada awal proses lelang, pada saat lelang berlangsung dan sampai tahap penunjukkan pemenang. Pada analisa rumusan pada studi kasus ini *nodes* dapat dikategorikan menjadi *nodes* peraturan, *nodes* pelaku pengadaan, *nodes* komunikasi dan *nodes* budaya.

barang dan jasa serta atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. *Nodes* Pelaku pengadaan juga bisa dikategorikan dalam beberapa tim pelaku. Dari PMU UIN Malang selaku wakil pihak *owner* pekerjaan, Panitia Kelompok Kerja (POKJA) lelang, staf dari tim *Saudi Fund for Development*. Sedangkan pada *nodes* komunikasi, yang menjadi bahan identifikasi adalah keterkaitan bentuk komunikasi *stakeholder* pelaku pengadaan saat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan. Mengacu pada hasil output *NVivo* yang bersumber dari dokumen terkait hasil penelitian ini dapat divisualisasikan dengan bantuan aplikasi *NVivo* ditampilkan pada gambar 3. Visualisasi hasil olah data *NVivo* ini berdasarkan data peraturan presiden, peraturan LKPP, dan SFD. Peraturan presiden terkait dengan sistem pengadaan di Indonesia, metode pengadaan di Indonesia dan waktu pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi, serta dokumen yang dipersyaratkan. Peraturan LKPP terkait dengan syarat tambahan untuk proses pengadaan. SFD berhubungan dengan approval setiap langkah proses yang dilakukan, waktu pelaksanaan proses, dan dokumennya.



Gambar 2. Visualisasi Hasil Olah Data *Nvivo* (Project Map)

Berikut ini penjelasan tentang pemahaman hasil visualisasi dengan *Project Map*:

a. Node Faktor Keterlambatan (variabel):

Node ini akan mewakili kategori utama (*parent node*) dari faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi, yaitu peraturan acuan, objek/pelaku. Komunikasi, dan budaya. *Parent node* merupakan topik umum yang memiliki topik khusus (*child node*);

b. Sub-node Faktor Spesifik(sub variabel):

Di bawah *node* Faktor Keterlambatan, terdapat *sub-node* (*child note*) yang mewakili sub faktor-faktor (lebih spesifik) yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Dalam *nodes* peraturan, terdapat *sub-node* "Peraturan Presiden," dapat ditambahkan *sub-sub-node* seperti "Penyesuaian sistem pengadaan, metode pengadaan, waktu pelaksanaan dan dokumen;

c. Koneksi dan Pola

Dalam *Project Map*, koneksi antara *node* dan *sub-node* menggambarkan hubungan dan pola antara faktor-faktor yang berbeda. Hasil analisa dapat ditemukan bahwa faktor "Peraturan Presiden" dapat dijabarkan dan sub faktor "dokumen" saling terkait dan berkontribusi terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi.

Dengan memperhatikan hasil olah data *nvivo* dapat terlihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan yang terjadi dalam proses pengadaan ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang terjadi pada proses didalamnya.

Faktor Peraturan dan Pedoman dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman yang dibuat oleh pihak *lender* secara umum memang tidak ada perbedaan yang signifikan, namun ada beberapa hal tertentu yang harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman dari *lender*. Menurut (Nursetyo, 2016) dituliskan pada hasil penelitiannya bahwa pengadaan jasa konstruksi harus berpedoman pada aturan pemerintah yang berlaku. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa pengadaan konstruksi ini adalah untuk pekerjaan yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri/*Loan*, sehingga dalam implementasi pengadaannya tetap harus mengacu juga pada /pedoman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman/*lender* namun juga tetap mengacu pada aturan pemerintah Indonesia. Menurut penelitian (Mayasari, 2019), Metode pengadaan secara elektronik itu lebih efisien dari segi waktu dan biaya, akan tetapi melihat hasil olah data penelitian ini dapat terlihat bahwa secara waktu pelaksanaan pengadaan metode manual ini memang membutuhkan waktu jauh lebih lama sehingga ditakutkan akan berpengaruh pada kelanjutan proses konstruksinya. Meskipun begitu, metode ini tetap dipilih dan dilaksanakan karena merupakan bagian dari pedoman pengadaan (*procurement*) dari *lender* yang harus dijalankan.

Faktor Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor pergantian *lender* baru yang ada di Indonesia membuat tim dari kelompok kerja dari Kementerian Agama Pusat harus mempelajari secara detail sistem dan model yang dimiliki oleh *lender SFD* ini, sehingga membutuhkan waktu dalam memahami detail dokumen ini dan membuat lamanya proses dalam setiap tahapan serta diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber I bahwa dikarenakan minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengadaan barang jasa sumber dana loan di lingkungan UIN Malang. Sejalan dengan hasil penelitian oleh (Ardi Kasmono, 2017) bahwa kinerja tim kelompok kerja di masing-masing UPT masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas sesuai SOP dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku.

Faktor Komunikasi

Faktor ketiga yang menyebabkan keterlambatan adalah adanya permasalahan dalam komunikasi. Keterbatasan komunikasi ini memiliki pengaruh terhadap percepatan waktu

penyelesaian proses pengadaan. Sesuai hasil wawancara dengan narasumber I dinyatakan bahwa komunikasi jarak jauh ini memiliki pengaruh meski bukan sepenuhnya menjadi sebuah kendala. Hasil konfirmasi dengan narasumber III menyatakan bahwa perlunya ada kantor perwakilan *SFD* di Indonesia agar memudahkan proses komunikasi dan permohonan atas klarifikasi apabila ada permasalahan pada dokumen administrasi. Menurut (Bekli et al., 2010) proses administrasi penerbitan *NOL* sebagai dasar persetujuan untuk melanjutkan proses tahapan dalam pengadaan membuat jangka waktu pelaksanaan menjadi lebih lama sehingga diperlukan kantor perwakilan yang ada di Indonesia untuk memudahkan proses ini.

Faktor Budaya

Faktor terakhir keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan dengan pinjaman luar negeri adalah faktor budaya. Pada faktor budaya hasil dari analisa data disebutkan bahwa budaya perayaan hari besar agama islam di negara *lender* lebih kental dibandingkan dengan di Indonesia. Menurut (Mashito et al., 2018) tradisi cuti bersama atau hari libur bagi PNS di Saudi Arabia saat perayaan hari raya Idul Adha secara peraturan dan Undang-undang tenaga kerja di Saudi Arabia adalah 4 hari. Fakta ini sangat berbeda dengan realita saat pelaksanaan kegiatan pengadaan. Dari hasil komunikasi hasil wawancara dengan narasumber1 dan narasumber 3 yang berkomunikasi langsung dengan *staff officer SFD* bahwa pada saat menyambut musim haji tersebut semua kegiatan kerajaan akan libur sampai dengan 1 bulan lamanya. Akibat lamanya waktu libur tersebut secara otomatis menyebabkan segala aktivitas komunikasi dan adminitrasi menjadi berhenti dan atau tidak maksimal ketika proses pengadaan berlangsung bersamaan dengan waktu musim haji.

Uji Confirmability

Mengacu pada hasil wawancara dengan ketiga narasumber maka dapat diketahui bahwa faktor keterlambatan hasil dari olah data secara *NVivo* telah terbukti valid. Jadi keterlambatan atau lamanya proses pengadaan jasa konstruksi ini memang terjadi akibat beberapa faktor tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian secara umum keterlambatan ini diakibatkan oleh banyak faktor dan sangat komplek. Beberapa faktor yang ditemukan dari hasil olah data *nvivo* antara lain adalah perlunya diberlakukan sistem perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang mudah untuk dikombinasikan dengan pedoman pengadaan (*procurement*) dari pihak *lender*, sehingga dengan begitu tidak terlalu membutuhkan waktu lebih lama untuk menunggu *approval* yang harus dipenuhi dari pihak pemberi pinjaman/*lender*.

Faktor berikutnya adalah kurangnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia pelaksana pengadaan (*personil* pengadaan) dalam mengimplementasikan pengadaan yang bersumber dana loan. Banyaknya tahapan yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan ketentuan dari *SFD* dan sebagai upaya untuk menyatukan *lender* dengan peraturan pengadaan yang ada di Indonesia membuat tidak banyak *personil* pada Unit Layanan Pen-gadaan /ULP yang mempunyai pengalaman seperti ini. Dengan kondisi seperti ini membuat pelaksanaan pengadaan ini juga membutuhkan waktu dalam pemahaman dokumen yang diper-lukan.

Selanjutnya faktor komunikasi menjadi faktor berikutnya yang diperoleh dari hasil olah data. Dengan memperhatikan jangkauan wilayah antar *stakeholder* pelaku pengadaan yang berjauhan dan kebutuhan untuk selalu sinkronisasi dokumen dalam setiap tahapan maka diperlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih untuk membangun komunikasi tersebut. Kondisi demikian membuat proses ini membutuhkan waktu lebih panjang.

Dan faktor terakhir yang diperoleh adalah faktor budaya/*culture* negara *lender*. Keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dikarenakan budaya kerja dan jam kerja di Arab Saudi

yang berbeda dengan di Indonesia membuat waktu penyelesaian pengadaan ini mengalami kemunduran dalam kebutuhan pengambilan keputusan.

Dengan memperhatikan beberapa faktor yang diperoleh dari olah data penelitian ini dapat ditemukan sebuah keterikatan di antara faktor-faktor yang ditemukan. Faktor yang paling penting dan paling dominan karena akan memiliki pengaruh terhadap munculnya faktor yang lain adalah faktor komunikasi, Kelancaran komunikasi yang mampu terbangun antar stakeholder pada proses pengadaan konstruksi ini adalah kunci dari penyelesaian keterlambatan yang terjadi.

Diperlukan sebuah langkah yang tepat dalam perencanaan pengadaan dengan melakukan komunikasi yang intens agar dapat mewujudkan pelaksanaan lelang sumber dana loan SFD ini bisa berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah direncanakan. Diperlukannya sebuah kantor perwakilan untuk officer SFD agar memudahkan komunikasi antar stakeholder.

Saran lain yang bisa diberikan dengan melihat hasil penelitian ini adalah diperlukan persiapan lebih detail terutama terkait time management dalam pengaturan waktu. Diperlukan schedule procurement yang tepat dengan memberikan spare time sebagai bentuk antisipasi waktu dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mengingat banyaknya langkah atau tahapan yang perlu dilakukan, khususnya pengadaan barang/jasa yang menggunakan sumber dana loan dengan lender-lender yang berinvestasi di Indonesia.

Kemudian sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dikembangkan lagi dengan melakukan perbandingan sistem pengadaan pada metode pengadaan yang terjadi untuk pengadaan jasa konsultansi dan atau pengadaan jasa konstruksi pada lender-lender selain SFD dan yang pernah memberikan bantuan loan kepada pemerintah Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardi Kasmono. (2017). Evaluasi Kinerja Pokja UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengadaan di Pemerintah Propinsi Jawa Timur. *Unair.Ac.Id*, 1–14.
- Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. In *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. (First Edit, Issue 1). Jakarta : Mitra Wacana Media, 2019.
- Bekli, F. Y., Syahrudin, & Riyanny, P. (2010). *Pengadaan Jasa Konsultansi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (Kps) Yang Dibiayai Oleh Islamic Development Bank*. 1–12.
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1122–1132. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>
- Fithriyah, F. (2017). Merdeka Menyikapi Phln Dan Komitmen Internasional. *Jurnal Inspirasi*, 63–68. <http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/viewFile/104/73>
- G. Nobalazi, A Manlian, S. R. (2021). Sehingga Dalam Pelaksanaan Konstruksi Dapat Mencapai Mutu Yang Baik , Kemudian Melakukan. *Prosiding CEEDRiMS*, 231–237.
- Hamkah, H., & Purwanto, H. (2018). Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Simetrik*, 8(2), 107. <https://doi.org/10.31959/js.v8i2.182>
- Hanik, U., & Sugiantoro, H. (2010). Monitoring & Evaluasi Sebagai Konsensus Untuk Mencapai Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 1, 1(November), 132–162. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/15/5>
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

- Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.109>
- Mashito, D., Abdah, I. F., & Rahayu, B. I. (2018). Tradisi Umum Perayaan Hari Raya, Pernikahan dan Upacara Kematian Masyarakat Arab. *Semnashama*, 2, 407–414.
- Mayasari, V. (2019). *Perbandingan Pelelangan Sistem Manual dengan Sistem(LPSE)*. 79–88.
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Nursetyo, G. (2016). Tinjauan Manajemen Pengadaan Jasa Konstruksi. *E-Journal UTP*. PERPRES RI No. 12 tentang Perub PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden Republik Indonesia (2021).
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia-PerPres 16/2018 1 (2018). <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>
- SFD s. (2001). *Procurement s*.
- Suryani, A. (2016). Analisis Pengaruh Pinjaman Luar Negeri, Surat Utang Negara, Penerimaan Pajak Dan Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Tahun 2000. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 268–282.
- Widjanarko. (2021). Widjanarko_2021_Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri. *Kewidyaiswaraan*, 6(2), 167–176.